



PELATIHAN PENERAPAN AKUNTANSI DESA DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Siska¹, Raja Ade Fitrasari Mochtar¹, Nina Nursida¹, Haugesti Diana¹, Indri Adinda¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau, Jalan Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru, Riau, Indonesia, 28284

*Penulis koresponden: rajaadefitrasari@eco.uir.ac.id

Info Artikel

Riwayat:

Dikirim 11 Januari 2022

Direvisi 17 Januari 2022

Diterima 17 Januari 2022

Kata Kunci:

Akuntansi Desa
Pemerintahan Desa
Laporan Keuangan
Reliable
Akuntable

Abstrak

Akuntansi desa adalah proses pencatatan dari transaksi keuangan yang terjadi di pemerintahan desa yang diawali dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi keuangan, kemudian data tersebut digunakan untuk pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa kepada pihak-pihak terkait. Penerapan akuntansi desa di desa-desa yang ada di Indonesia masih menemui berbagai permasalahan, seperti tidak membuat buku besar untuk semua akun yang dibutuhkan, akibatnya saldo pada akun rill (seperti aset) tidak dibawa ke periode berikutnya. Permasalahan ini juga dihadapi di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa agar dalam penerapan akuntansi desa dapat dilakukan sesuai dengan standar akuntansi desa dan peraturan yang berlaku. Penerapan akuntansi desa yang dilakukan secara benar tentu dapat menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa yang lebih *reliable* dan *akuntable*. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kantor Camat Seberida yang dihadiri oleh para perangkat desa yang terdiri dari kepala-kepala desa dan bendahara-bendahara desa yang ada di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa dengan tujuan untuk memberikan pengalaman dan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai penerapan akuntansi desa. Pelaksanaan pengabdian mendapatkan respon yang positif dari para peserta karena memudahkan perangkat desa dalam memahami penerapan akuntansi desa agar menghasilkan laporan keuangan desa yang lebih memadai.

PENDAHULUAN

Akuntansi adalah aktivitas jasa yang berguna dalam persediaan informasi terutama informasi keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi akuntansi sebagai penyedia informasi lebih berkaitan erat dengan informasi keuangan kuantitatif daripada yang bersifat kualitatif. Akuntansi pemerintahan bisa didefinisikan selaku kegiatan pemberian jasa yang menyediakan data keuangan pemerintah bersumber pada proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah.

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi dipemerintahan desa

yang diawali dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi keuangan, kemudian data tersebut digunakan untuk pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa kepada pihak-pihak terkait.

Adapun gambaran tahap kegiatan akuntansi keuangan desa adalah pertama yaitu tahap pencatatan tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti transaksi lalu mencatat ke buku harian atau jurnal umum. Kedua yaitu tahap penggolongan merupakan tahap pengelompokan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit. Ketiga tahap pengikhtisaran, pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Keempat tahap terakhir dari siklus akuntansi adalah tahap pelaporan, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan yang pertama yaitu Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Selanjutnya membuat Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan Kekayaan Milik Desa memuat tentang posisi aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan, aset tidak lancar, kewajiban, dan ekuitas pemerintahan desa per 31 Desember Tahun tertentu

Pencatatan keuangan yang dilakukan oleh perangkat desa berbasis kas yaitu transaksi dicatat pada saat penerimaan kas atau pada saat pengeluaran kas, pendapatan yang terjadi diakui saat kas diterima dan beban diakui kas dikeluarkan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa BPKP telah membuat aplikasi keuangan desa (Siskeudes) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pembukuan dan pertanggungjawaban.

Proses akuntansi yang selama ini dilakukan oleh perangkat desa masih terdapat permasalahan seperti tidak membuat buku besar, tidak melakukan penyesuaian terhadap persediaan dan tidak menyajikan penyusutan aset tetap. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap proses akuntansi secara keseluruhan. Ini dapat menyebabkan laporan pertanggung jawaban dana desa tidak sesuai dengan kenyataannya.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu dalam bentuk Pelatihan untuk menyampaikan materi serta diskusi dengan perangkat desa yang ada di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Tempat kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 dari pukul 08.00 s/d Pukul 17.30 WIB. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, berikut rangkaian pelaksanaan pengabdian.

1. Melakukan pra proposal dengan menghubungi pihak mitra
2. Merumuskan materi yang akan disampaikan
3. Kegiatan pengabdian akan dibagi dalam beberapa sesi. Sesi I penyampaian materi. Sesi II Diskusi.
4. Penyusunan Laporan Hasil pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan Pelatihan Penerapan Akuntansi Desa di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang dilaksanakan pada hari Rabu 24 November 2021 di Kantor Camat Seberida, memberikan beberapa poin pembahasan sesuai dengan hasil survey awal pelaksana mengenai permasalahan penerapan akuntansi desa yang biasa ditemukan pada desa-desa.

Proses akuntansi desa dimulai dengan pencatatan bukti transaksi ke buku besar. Setiap transaksi yang terjadi baik yang terkait dengan penerimaan pendapatan pengeluaran belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum (BKU). Selanjutnya atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan pencatatannya dibukukan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai Secara Umum Desa sudah membuat buku kas Umum, buku kas pembantu kegiatan, Buku bank, buku pembantu bank. Namun, *jarang sekali* membuat buku besar untuk semua

akun yang di butuhkan. Akibatnya saldo pada akun riil (seperti aset) tidak dibawa ke periode berikutnya.

Setelah seluruh transaksi dicatat pada BKU dan Buku Besar, tahap berikutnya adalah tahap pengikhtisarannya dari buku besar ke neraca saldo. Pencatatan ke neraca saldo dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses yang dilakukan telah dilakukan pencatatannya dengan benar (pengecekan debit dan kreditnya sudah seimbang).

Dengan dibuatnya neraca saldo maka akan memudahkan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Namun, hampir tidak ditemukan Desa membuat Neraca Saldo, melakukan penyesuaian dan membuat kertas kerja. Tahap berikutnya yaitu penyusunan laporan keuangan desa yang terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Secara umum Desa di Provinsi Riau sudah menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dengan benar. Namun, pada Laporan Kekayaan Milik Desa masih terdapat permasalahan pada penyajian beberapa akunnya, yaitu sering ditemukan kesalahan nilai saldo pada penyajian akun kas, persediaan dan aset tetap di Laporan Kekayaan Milik Desa. Hal ini dikarenakan buku besar yang tidak digunakan untuk akun-akun riil tersebut yang seharusnya digunakan untuk mengakumulasi saldo yang seharusnya dibawa ke periode berikutnya.

KESIMPULAN

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu 24 November 2021, dimulai dengan kata sambutan oleh pelaksana kegiatan dan Kepala Kantor Camat Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dilanjutkan dengan doa bersama. Kemudian penyampaian materi pelatihan mengenai penerapan akuntansi desa kepada perangkat desa yang terdiri dari kepala desa dan bendahara desa yang ada di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Materi disampaikan oleh pelaksana kegiatan yang berisikan tentang permasalahan akuntansi yang biasanya masih ditemukan pada desa.

Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa agar dalam penerapan akuntansi desa dapat dilakukan sesuai dengan standar akuntansi desa dan peraturan yang berlaku. Penerapan akuntansi desa yang dilakukan secara benar tentu dapat menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa yang lebih *reliable* dan *akuntable*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak dapat penulisan laksanakan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak baik bantuan berupa moril dan materil. Oleh karena itu ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Bapak Roma Doris, S.S., MPS., M.Eng selaku Kepala Camat Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno, dan Estralia Trisnawati, 2013. Akuntansi Perpajakan, Edisi Tiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Belkaoui, Ahmed Riahi, 2011. Teori Akuntansi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Harahap, Sofyan Syafitri, 2011, Teori Akuntansi, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Ikhsan, Arfan, 2012, Pengantar Praktis Akuntansi, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Kartikhadi, Hans, dkk, 2012, Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Mulyadi, 2010, Sistem Akuntansi, Cetakan Kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sujarweni, V, Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Jakarta : Pustaka Baru Press.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2013, Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompertamen ASP : Pedoman Sistensi Akuntansi Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

LAMPIRAN

Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat





